



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dewan Pertanyakan Tambahan Modal Rp 11 Triliun untuk BUMD

### Sebagian program janji kampanye Gubernur Anies Baswedan terancam.

Linda Hairani

[linda.hairani@tempo.co.id](mailto:linda.hairani@tempo.co.id)

JAKARTA — Mayoritas anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum menyetujui tambahan penyerahan modal yang diajukan sejumlah badan usaha milik daerah. Dewan masih mempertanyakan tambahan modal sekitar Rp 11,7 triliun yang sebagian di antaranya untuk pelaksanaan janji kampanye Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, Triwisaksana, mengatakan permintaan tambahan modal itu tak sesuai dengan kebijakan umum pemerintah DKI Jakarta saat menyusun APBD 2018. Akhir tahun lalu, pemerintah DKI mewajibkan BUMD mencari permodalan di luar

APRD untuk mendanai rencana bisnis mereka.

"Mengapa saat anggaran perubahan ini kebijakannya berubah?" kata dia dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 Perubahan, kemarin.

Total penyerahan modal daerah yang diminta BUMD pada tahun ini naik dibanding tahun lalu. Pada APBD 2017, menurut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, tambahan modal untuk BUMD hanya Rp 5,8 triliun.

Badan Anggaran DPRD antara lain menyoroti permintaan tambahan modal oleh PT Jakarta Propertindo. Perusahaan daerah ini meminta suntikan modal untuk menggarap proyek rumah susun tanpa uang muka alias *down payment* (DP) nol rupiah.

Anggota Badan Anggaran

an dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pandapotan Sinaga, mengatakan pembangunan hunian DP nol rupiah seharusnya tak dibiayai anggaran daerah. Sebab, unit rumah susun yang dibangun kelak dijual untuk masyarakat dan menjadi potensi perusahaan untuk

DOIK TEMPO/ERIKO GIYAWO/REYU/DOIK



**Permintaan tambahan modal itu tak sesuai dengan kebijakan umum pemerintah DKI Jakarta saat menyusun APBD 2018.**

— TRIWISAKSANA

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD

mencari untung. "Beda dengan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), DP nol ini bisnisnya BUMD," kata dia.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus juga menentang permintaan tambahan modal yang diajukan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Perusahaan pelat merah ini meminta tambahan modal Rp 935 miliar, yang antara lain akan digunakan untuk pembelian lahan rumah susun DP nol rupiah. "Masak, beli lahan pakai anggaran daerah lalu dijual untuk bisnis?" kata dia.

Lantaran belum ada persetujuan dari mayoritas fraksi di DPRD, Triwisaksana memutuskan rapat pembahasan penyerahan modal daerah dilanjutkan Senin pekan depan. Ia meminta komisi-komisi DPRD membahas urgensi permintaan tambahan penyerahan modal untuk BUMD itu. "Selanjutnya baru diputuskan untuk disetujui atau ditolak,"

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dewan Pertanyakan Tambahan Modal Rp 11 Triliun untuk BUMD

kata dia.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan perusahaannya mengajukan Rp 2,3 triliun tambahan penyertaan modal daerah. Modal itu nantinya akan digunakan untuk proyek *light rail transit* (LRT) fase II sebesar Rp 1,8 triliun, dan pembangunan rumah susun DP nol senilai Rp 500 miliar. Rumah susun berlokasi di depo LRT Kelapa Gading dan Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, dengan total 6.200 unit.

Dwi membantah anggapan bahwa pembangunan rumah susun DP nol merupakan cara perusahaan untuk meraih laba.

Ia mengatakan program itu merupakan penugasan dari Gubernur Anies Baswedan. Untuk mencari untung, menurut dia, perusahaan lebih memilih mengoptimalkan kawasan Pulomas, Jakarta Timur, sebagai potensi bisnis. "Kalau PMD ini tak disetujui, kami tak bisa melaksanakan penugasan," kata dia.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan rancangan APBD Perubahan yang dibahas Badan Anggaran sudah disusun dengan cermat. Begitu pula pengajuan penyertaan modal daerah dari BUMD. "Kami sudah mengutamakan asas kehati-hatian," kata dia.

## Suntikan Modal atau Subsidi

Sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu sebesar Rp 13 triliun membuka peluang bagi sejumlah badan usaha milik daerah untuk mengajukan permintaan tambahan modal. Mereka pun ramai-ramai mengajukan permintaan suntikan modal dengan total sekitar Rp 11,7 triliun.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menilai permintaan penyertaan modal daerah yang diajukan BUMD terlalu besar. Ketimbang diberikan kepada BUMD, menurut dia, sisa anggaran lebih baik dialokasikan untuk menyubsidi program prioritas pemerintah DKI Jakarta. "Masih ada subsidi KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang harus ditambah," kata dia mencontohkan.

Tahun depan, menurut Pandapotan, juga bakal ada tiga moda transportasi massal yang beroperasi di Ibu Kota. Ketiganya adalah *mass rapid transit*, *light rail transit*, dan Transjakarta. "Kebutuhan subsidiya pasti akan besar," ujar dia.

Berikut ini daftar permintaan tambahan modal yang diajukan sejumlah BUMD serta program unggulan pemerintah DKI yang membutuhkan subsidi.

### Permintaan Penyertaan Modal

- PT Mass Rapid Transit Jakarta: Rp 3 triliun
- PT Jakarta Propertindo: Rp 4,6 triliun
- PD PAL Jaya: Rp 235 miliar
- PD Dharma Jaya: Rp 79 miliar
- PD Food Station Tjipinang Jaya: Rp 85 miliar
- PD Sarana Jaya: Rp 935 miliar
- PD Paser Jaya: Rp 166 miliar
- PAM Jaya: Rp 1,2 triliun

### Program Prioritas Pemerintah DKI

1. Kartu Jakarta Pintar Plus
2. One Karcis, One Trip
3. Kartu Jakarta Sehat Plus
4. Kartu Pangan Jakarta

● LINDA HARBANI